



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA,
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZACCARIAS ROSE PRIHATIN TJUKUP MULYONO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 210126

II. DATA HARTA

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 516.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m ² /125 m ² di SEMARANG,
HASIL SENDIRI Rp. 516.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 229.300.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000 | | |
| 2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 1983, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000 | | |
| 3. MOTOR, SUZUKI SPIN SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000 | | |
| 4. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 12.500.000 | | |
| 5. MOTOR, VESPA SPRINT SCOOTER Tahun 1968, HASIL SENDIRI
Rp. 2.300.000 | | |
| 6. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE MINIBUS Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 61.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 56.148.071 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 862.448.071 |



III. HUTANG

Rp.

62.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

800.448.071

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.